

INTISARI

ANALISIS KEBIJAKAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Oleh:

Puspa Srigusti Ayu (21/483766/SV/20491)

PROGRAM STUDI PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

Proyek Akhir ini akan memaparkan hasil analisis kebijakan dan analisis kebijakan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Salah satu alat komunikasi yang digunakan dalam urusan kedinasan suatu organisasi ialah naskah dinas, maka perlu adanya aturan yang membakukan naskah dinas dan penyusunan naskah dinas dalam organisasi yang disebut dengan tata naskah dinas. Penulisan proyek akhir ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan, kendala dan tantangan yang dihadapi, dan hal yang perlu diperbaharui dalam kebijakan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Proyek Akhir ini dengan cara observasi, wawancara, dan studi Pustaka dengan desain penelitian kualitatif deskriptif. Observasi dan wawancara dilakukan secara bersamaan dengan cara mengamati dan ikut terlibat dalam implementasi kebijakan tata naskah dinas. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

Implementasi kebijakan tata naskah dinas di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara memiliki cakupan pelaksanaan meliputi jenis dan format naskah dinas, penyusunan naskah dinas, tata surat dinas, dan penggunaan lambang negara, logo dan slogan instansi, cap dinas, serta *security printing*. Kendala dan tantangan yang dihadapi berupa penyesuaian terhadap kebijakan tata naskah dinas terbaru, perkembangan teknologi, dan struktur organisasi yang telah diperbaharui oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Hal-hal yang perlu diperbaharui terhadap kebijakan tata naskah dinas yaitu penyesuaian format naskah dinas, kode naskah dinas, dan penambahan aturan yang belum terakomodir dalam kebijakan tata naskah dinas saat ini.

Kata kunci: *Naskah Dinas, Tata Naskah Dinas, Analisis Kebijakan*

ABSTRACT

ANALYSIS OF CREATION POLICIES WITHIN THE MINISTRY OF STATE-OWNED ENTERPRISES

By:

Puspa Srigusti Ayu (21/483766/SV/20491)

APPLIED ARCHIVES AND RECORD MANAGEMENT SCIENCE
VOCATIONAL COLLEGE
GADJAH MADA UNIVERSITY

This Final Project describes the result of an analysis of creation policies within the Ministry of State-Owned Enterprises. One of the communication tools used in the official affairs of an organization is the official document (records), it is necessary to have rules to standardize official scripts and the preparation of official scripts within the organization which is called the creation policy. The purpose of writing this final project is to find out the implementation of the policies, the constraints and challenges faced, and things that need to be updated in the creation policy within the Ministry of State-Owned Enterprises.

The data collection method used in the preparation of this Final Project is by observation, interviews, and literature study with a descriptive qualitative research design. Observations and interviews are conducted simultaneously by observing and being involved in the implementation of creation policies. Data reduction, data presentation, and conclusion drawing are analytical techniques used in research.

The implementation of the creation policy within the Ministry of State-Owned Enterprises has a scope of implementation covering the type and format of official document, preparation of official document, official letter arrangement, and use of national emblems, agency logos and slogans, official stamps, and security printing. The constraints and challenges faced are adjustments to the latest official governance policies, technological developments, and organizational structure that have been update by the Ministry of State-Owned Enterprises. Things that need to be updated on the creation policy are adjustments to the official document format, official document code, and the addition of rules that have not been accommodated in the current creation policy.

Keywords: *Official Document (records), Record Creation, Policy Analysis*